

BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bab ini diuraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target indikator kinerja serta program, bidang urusan urusan dan SKPD penanggung jawab dapat diuraikan sebagai berikut :

7.1 KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH

Misi ke-1 :

Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Mendukung Pengembangan Wilayah/Kawasan Berwawasan Lingkungan, ditempuh melalui kebijakan sebagai berikut:

1. Pekerjaan Umum
 - a. Memantapkan kondisi jalan dan menambah panjang jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa;
 - b. Meningkatkan pelayanan jasa konstruksi;
 - c. Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air yang handal untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air.
2. Perhubungan
 - a. Meningkatkan penataan pelayanan transportasi wilayah khususnya perhubungan darat (ASDP, LLAJ dan KA) di perkotaan dan antar wilayah;
 - b. Mengembangkan kerjasama pembangunan investasi infrastruktur transportasi laut dan udara (Pelabuhan dan Bandara).
3. Perumahan
 - a. Meningkatkan kinerja pengelolaan dan pembangunan gedung dan rumah negara;

- b. Meningkatkan pembangunan infrastruktur permukiman;
 - c. Mengembangkan pembinaan dan penataan perumahan;
 - d. Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum, sanitasi, persampahan dan air limbah.
4. Penataan Ruang
- a. Meningkatkan koordinasi penataan ruang wilayah dan kawasan serta pengendalian pemanfaatan ruang daerah;
 - b. Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha, pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan ruang;
 - c. Memantapkan peran Provinsi dalam koordinasi penataan ruang.
5. Lingkungan Hidup
- a. Membina dan mengusahakan kerjasama pembangunan antar daerah terkait pengelolaan sampah terpadu regional;
 - b. Meningkatkan pengelolaan pencemaran air, udara dan tanah terkait Rencana Aksi Daerah untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GTR);
 - c. Mengembangkan pola kemitraan jasa lingkungan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam pengelolaan konservasi sumberdaya alam, hutan, pesisir laut dan pulau-pulau kecil;
 - d. Meningkatkan pengamanan dan pencegahan kerusakan kawasan hutan.
6. Energi dan Sumber Daya Mineral
- a. Meningkatkan pengelolaan pasokan, cakupan dan kualitas pelayanan listrik mendukung kawasan strategis ekonomi dan usaha masyarakat pedesaan;
 - b. Meningkatkan pengusahaan pertambangan dan energy alternatif/energi terbarukan dan gerakan hemat energi bagi masyarakat dan pelaku usaha;
 - c. Membina dan mengembangkan bidang ketenagalistrikan dan energi.

Misi ke-2 :

Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, ditempuh melalui kebijakan sebagai berikut :

1. Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Menguatkan kelembagaan dan usaha, kapasitas SDM, sistem pembiayaan, dan peluang pasar K-UMKM yang sejalan dengan perkembangan dunia usaha.

2. Ketenagakerjaan

Perluasan kesempatan kerja.

3. Pertanian

Meningkatkan produksi, produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian.

4. Pariwisata

Meningkatkan keunggulan daya tarik wisata dan promosi wisata untuk peningkatan daya beli masyarakat.

5. Industri

Meningkatkan daya saing industri.

6. Perdagangan

Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam dan luar negeri serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional.

7. Energi dan Sumber Daya Mineral

Meningkatkan pengusahaan dan nilai tambah produksi sumber daya mineral.

8. Kelautan dan Perikanan

Mengembangkan kawasan minapolitan sebagai upaya percepatan pembangunan kelautan dan perikanan di sentra-sentra produksi perikanan.

9. Ketahanan Pangan

Peningkatan ketersediaan, akses, kualitas, keragaman dan keamanan pangan.

10. Kehutanan

Mengembangkan aneka usaha non kayu serta usaha ekonomi produktif sekitar hutan.

11. Penanaman Modal

- a. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka mempertahankan keberadaan investasi yang ada serta menarik investasi baru;
- b. Membentuk forum investasi serta meningkatkan promosi dan kerjasama investasi.

Misi ke-3 :

Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Religius, Cerdas dan Berdaya Saing dalam Kerangka Penguatan NKRI, ditempuh melalui kebijakan sebagai berikut :

1. Pendidikan

- a. Meningkatkan pemerataan dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. Menuntaskan Banten bebas buta aksara;
- c. Mewujudkan Banten bebas biaya pendidikan dasar dalam rangka penuntasan Wajib Dikdas sembilan tahun;
- d. Meningkatkan pengelolaan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah;
- e. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah;
- f. Fasilitasi peningkatan pemerataan dan mutu pendidikan tinggi;
- g. Meningkatkan pemerataan dan mutu Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFi);
- h. Meningkatkan pemerataan dan mutu Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK dan PLK);

- i. Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru serta tenaga kependidikan;
 - j. Pengembangan infrastruktur pendidikan berbasis Website dan TIK.
2. Perpustakaan
- a. Meningkatkan kemampuan dan budaya baca masyarakat khususnya pada usia sekolah;
 - b. Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi.
3. Kesehatan
- a. Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama masyarakat miskin dan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak);
 - b. Menyusun kebijakan standar pelayanan kesehatan provinsi, SPM bidang kesehatan, pedoman dan regulasi kesehatan;
 - c. Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular;
 - d. Mengembangkan sistem kesehatan;
 - e. Meningkatkan kecukupan obat dan peralatan kesehatan;
 - f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan;
 - g. Meningkatkan jumlah dan mengembangkan sarana dan prasarana Puskesmas termasuk Puskesmas PONED;
4. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- a. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan yang berbasis kemandirian berusaha;
 - b. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak.
5. Kepemudaan dan Olahraga
- a. Mewujudkan pemuda Banten yang memiliki semangat dan idealisme kebangsaan, kewirausahaan, kepemimpinan, kepeloporan dan kejuangan;

- b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sehat jasmani dan rohani melalui olahraga.
- 6. Ketenagakerjaan
 - a. Meningkatkan daya saing tenaga kerja;
 - b. Meningkatkan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan.

Misi ke-4 :

Penguatan Semangat Kebersamaan Antar-Pelaku Pembangunan dan Sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Selaras, Serasi dan Seimbang, ditempuh melalui kebijakan sebagai berikut :

- 1. Sosial
 - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial;
 - b. Meningkatkan pembinaan lembaga sosial, keagamaan, Perayaan Hari Besar Keagamaan, dan kerukunan antar umat beragama.
- 2. Kebudayaan

Meningkatkan upaya revitalisasi nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal yang relevan bagi peningkatan kemajuan Banten.
- 3. Kependudukan dan Catatan Sipil

Menata database penduduk dan penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan;
- 4. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Revitalisasi Program Keluarga Berencana.
- 5. Ketransmigrasian

Menata persebaran penduduk, baik di dalam maupun keluar wilayah provinsi.
- 6. Perencanaan Pembangunan

Mewujudkan kerjasama pembangunan antar daerah yang saling menguntungkan.

Misi ke-5 :

Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Berwibawa Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih, ditempuh melalui kebijakan sebagai berikut:

1. Perencanaan Pembangunan
 - a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan mengembangkan perencanaan yang pro publik;
 - b. Meningkatkan pengendalian pembangunan dan mengembangkan sistem pengawasan.
2. Komunikasi dan Informatika
 - a. Mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Pemanfaatan IPTEK untuk peningkatan daya saing daerah.
3. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 - a. Melaksanakan reformasi birokrasi melalui penataan struktur yang proporsional, mengembangkan profesionalisme, menerapkan insentif berbasis kinerja, dan pengadaan secara elektronik;
 - b. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan publik untuk mewujudkan *clean government and good governance*;
 - c. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel;
 - d. Menata sistem hukum di daerah;
 - e. Meningkatkan pembinaan tramtibmas, satuan perlindungan masyarakat, dan unsur rakyat terlatih lainnya;
 - f. Meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
 - g. Meningkatkan kapasitas lembaga legislatif;

4. Statistik

Meningkatkan kualitas data dan informasi pendukung perencanaan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan umum.

5. Kearsipan

Meningkatkan kinerja pengelolaan kearsipan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan.

6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Meningkatkan partisipasi dan peran kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan;

7. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- a. Memfasilitasi peningkatan peran dan fungsi partai politik, organisasi masyarakat dan organisasi swadaya masyarakat;
- b. Meningkatkan dan melibatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik;

7.2 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Visi dan Misi Provinsi Banten Tahun 2012-2017, perlu dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah program prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Secara garis besar dalam rangka melaksanakan Visi dan Misi maka dituangkan kedalam 12 (dua belas) program unggulan yang meliputi:

- 1) Program peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan kawasan dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis, kawasan cepat tumbuh dan perbatasan;
- 2) Program peningkatan pengelolaan sumber daya alam, ruang dan lingkungan hidup;
- 3) Program peningkatan peluang usaha dan kesempatan kerja;
- 4) Program pengembangan produk unggulan daerah yang inovatif;

- 5) Program peningkatan aksesibilitas ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan, pengangguran dan ketahanan pangan;
- 6) Program peningkatan kesadaran beragama dan keragaman budaya dalam kehidupan bermasyarakat;
- 7) Program peningkatan taraf pendidikan, kesehatan dan produktivitas sumber daya manusia Banten yang sehat, berkualitas, agamis dan berdaya saing;
- 8) Program pengembangan kreativitas dan inovasi teknologi dalam mendukung daya saing daerah;
- 9) Program peningkatan partisipasi dan keterwakilan masyarakat dalam pembangunan daerah;
- 10) Program penguatan peran pemerintah Provinsi Banten dalam pembangunan daerah yang didukung dengan kondisi masyarakat Banten yang rukun damai, bersatu dan bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat dalam membangun Banten;
- 11) Program peningkatan kualitas penyelenggaraan kerjasama pemerintah dan pembangunan;
- 12) Program peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam rangka peningkatan pelayanan publik;

Disamping memperhatikan Visi, Misi dan Program Unggulan Gubernur terpilih, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia juga harus mengacu pada prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN. Implementasi kebijakan pembangunan pusat dan provinsi, khususnya untuk percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dan daerah, termasuk program *Millenium Development Goals* (MDGs), disajikan pada skema persandingan dibawah ini:

Gambar 7.1
Implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010
Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional



Tabel 7.1
Program Pemerintah Provinsi Banten dalam Merespon Program MDGs

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM (MDGs)	PROGRAM DALAM RPJMD BANTEN TAHUN 2012-2017
1	Memberantas kemiskinan dan kelaparan	a. Pemberdayaan Masyarakat Miskin
		b. Pembinaan Upaya Kesehatan
		c. Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM
		d. Ketahanan Pangan Masyarakat
2	Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua	a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
		b. Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun;
		c. Peningkatan mutu, kesejahteraan dan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
3	Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	Menurunkan angka kematian anak	Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
5	Meningkatkan kesehatan ibu	a. Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
		b. Kependudukan dan Keluarga Berencana
6	Memerangi HIV dan AIDS, malaria serta penyakit lainnya	a. Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan

		b. Rehabilitasi Sosial
7	Memastikan kelestarian lingkungan	a. Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
		b. Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
8	Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan	Peningkatan Iklim Investasi;

Dari ke 12 (dua belas) Program Unggulan di atas, selanjutnya dijabarkan menjadi Program Prioritas yang terdiri dari 78 (tujuh puluh delapan) program yang dirumpunkan kedalam 25 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.2
Program Prioritas RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017

NO	BIDANG URUSAN	NO	PROGRAM PRIORITAS	SKPD
Urusan Wajib				
1	Pendidikan;	1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dindik
		2	Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun	Dindik
		3	Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun	Dindik
		4	Peningkatan mutu, kesejahteraan dan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dindik
		5	Pendidikan Tinggi	Dindik
		6	Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFi)	Dindik
		7	Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan Pendidikan	Dindik
2	Kesehatan;	8	Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Dinkes
		9	Pembinaan Upaya Kesehatan	Dinkes
		10	Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan	Dinkes
		11	Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan	Dinkes
		12	Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan	Dinkes/RSU Malimping
		13	Peningkatan mutu layanan kesehatan masyarakat	Dinkes/RSU Malingping

NO	BIDANG URUSAN	NO	PROGRAM PRIORITAS	SKPD
3	Pekerjaan umum;	14	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Dinas BMTR
		15	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas SDAP
		16	Pengembangan dan Revitalisasi Infrastruktur Permukiman	Dinas SDAP
4	Perumahan;	17	Pembinaan dan Penataan Perumahan	Dinas SDAP
5	Penataan ruang;	18	Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan	Bappeda/BMTR
6	Perencanaan pembangunan;	19	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Bappeda
		20	Pengendalian Pembangunan Daerah	Bappeda/Biro Ekbang
		21	Kerjasama Pembangunan Daerah	Bappeda/Biro Pemerintahan
7	Perhubungan;	22	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian	Dishubkominfo
8	Lingkungan hidup;	23	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	BLHD
		24	Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	BLHD/Dishutbun
10	Kependudukan dan catatan sipil;	25	Penataan Administrasi Kependudukan	Biro Pemerintahan
11	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;	26	Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPMD
12	Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;	27	Kependudukan dan Keluarga Berencana	BPPMD
13	Sosial;	28	Pemberdayaan Masyarakat Miskin	Dinsos/BPPMD
		29	Rehabilitasi Sosial	Dinsos
		30	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinsos
		31	Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan	Dinsos/Biro Kesra
14	Ketenagakerjaan;	32	Peningkatan Pengembangan Kelembagaan, Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	Disnakertrans
		33	Peningkatan Produktivitas, Perluasan, Kesempatan Kerja dan Berusaha	Disnakertrans

NO	BIDANG URUSAN	NO	PROGRAM PRIORITAS	SKPD
		34	Keterampilan Tenaga Kerja	Disnakertrans
15	Koperasi dan usaha kecil dan menengah;	35	Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM	Dinkop dan UMKM
		36	Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM	Dinkop dan UMKM
		37	Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM	Dinkop dan UMKM
16	Penanaman modal;	38	Peningkatan Iklim Investasi	BKPMPT
		39	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	BKPMPT
17	Kebudayaan;	40	Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya	Disbudpar
18	Kepemudaan dan olahraga;	41	Kepemudaan dan Kepramukaan	Dispora
		42	Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga	Dispora
19	Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;	43	Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik	Kesbangpol
20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;	44	Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum	Biro Pemerintahan, Biro Ekbang, Biro Humas dan Protokol, Biro Kesra, dan Kantor Penghubung
		45	Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Satpol PP
		46	Penanggulangan Bencana	BPBD
		47	Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah	Biro Perlengkapan dan Aset
		48	Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	DPPKD
		49	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Biro Organisasi
		50	Pembinaan Karier dan Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	BKD
		51	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Badiklat
		52	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Seluruh SKPD
		53	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	Seluruh SKPD
		54	Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	Inspektorat
		55	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Set DPRD

NO	BIDANG URUSAN	NO	PROGRAM PRIORITAS	SKPD
		56	Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM	Biro Hukum
		57	Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis, Inovasi Daerah dan IPTEK	Balitbangda
21	Ketahanan pangan;	58	Ketahanan Pangan Masyarakat	BKPP
22	Pemberdayaan masyarakat dan desa;	59	Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan	BPPMD
23	Statistik;	60	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	Seluruh SKPD
24	Kearsipan	61	Pembinaan Kearsipan Daerah	Baperpus-arda
25	Komunikasi dan informatika;	62	Pengembangan Komunikasi , Informasi dan Telematika	Dishubkominfo/Set. KPID
26	Perpustakaan.	63	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Baperpus-arda
		64	Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	Baperpus-arda
Urusan Pilihan				
1	Pertanian;	65	Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan	Distanak/DKP/Dishutbun
		66	Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan	Distanak/DKP/Dishutbun
		67	Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan	Distanak/BKPP/Dishutbun
		68	Peningkatan Daya Dukung Sumberdaya Pertanian	Distanak
2	Kehutanan;	69	Peningkatan daya dukung sumber daya hutan dan lahan	Dishutbun
3	Energi dan Sumber Daya Mineral;	70	Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi	Distamben
		71	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi	Distamben
		72	Pengembangan, Pengusahaan Potensi dan Produk Pertambangan dan Energi	Distamben

NO	BIDANG URUSAN	NO	PROGRAM PRIORITAS	SKPD
4	Pariwisata;	73	Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata	Disbudpar
		74	Pengembangan Kemitraan Kepariwisata	Disbudpar
5	Kelautan dan perikanan;	75	Pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	DKP
6	Perdagangan;	76	Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan	Disperindag
7	Industri;	77	Peningkatan Daya Saing Industri	Disperindag
8	Ketrasmigrasian.	78	Penyiapan, Pengerahan dan Pembinaan Transmigrasi	Disnakertrans
Jumlah		78 Program		

Adapun hubungan antara kebijakan umum, program pembangunan daerah, indikator kinerja program, bidang urusan dan SKPD penanggung jawab diuraikan sebagaimana Tabel 7.3:

Tabel 7.3
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2012-2017

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
Misi Pertama:							
Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Mendukung Pengembangan Wilayah/Kawasan Berwawasan Lingkungan							
1	Memantapkan kondisi jalan dan menambah panjang jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Prosentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap (%)	71,15%	100%	Pekerjaan Umum	Dinas BMTR
2	Meningkatkan pelayanan jasa konstruksi		Prosentase panjang jembatan provinsi dalam kondisi mantap (%)	86%	96%	Pekerjaan Umum	Dinas BMTR
3	Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Air	Cakupan pelayanan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan banjir dan abrasi (%)	35	46,2	Pekerjaan Umum	Dinas SDAP
			Luas layanan peningkatan dan rehabilitas jaringan irigasi teknis (Ha)	1360	15118,5	Pekerjaan Umum	Dinas SDAP

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
4	Meningkatkan penataan pelayanan transportasi wilayah khususnya perhubungan darat (ASDP,LLAJ dan KA) di perkotaan dan antar wilayah	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian	Rasio Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Perhubungan melalui penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan menjadi 100% tahun 2017	8,69%	19,90%	Perhubungan	Dishubkominfo
5	Mengembangkan kerjasama pembangunan investasi infrastruktur transportasi laut dan udara (Pelabuhan dan Bandara)		Tingkat pembinaan dan pemantauan angkutan darat laut dan udara sebesar 100% tahun 2017	10,55%	100,00%	Perhubungan	Dishubkominfo
6	Meningkatkan kinerja pengelolaan bangunan gedung/ rumah negara	Program Pembinaan dan Penataan Perumahan	Rasio Pembinaan dan Penataan Perumahan	45	100%	Perumahan	Dinas SDAP
7	Meningkatkan pembangunan infrastruktur permukiman						

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
8	Mengembangkan pembinaan dan penataan perumahan						
9	Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum, sanitasi, persampahan dan air limbah						
10	Meningkatkan koordinasi penataan ruang wilayah dan kawasan serta pengendalian pemanfaatan ruang daerah	Program Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan	Cakupan ketersediaan regulasi dan dokumen rencana tata ruang wilayah (dok)	3	15	Penataan Ruang	Bappeda
11	Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha, pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan ruang		Rasio Rencana Kawasan Strategis yang Tersusun (%)	3,00%	14,17%	Penataan Ruang	BMTR
12	Memantapkan peran Provinsi dalam koordinasi penataan ruang		Rasio Peningkatan Kualitas Penataan Ruang Kota (paket)	1 Paket	5 Paket	Penataan Ruang	BMTR

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
13	Membina dan mengusahakan kerjasama pembangunan antar daerah terkait pengelolaan sampah terpadu regional	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Persentase kualitas air yang terpantau dan terinformasikan menurut SPM (%)	40%	100%	Lingkungan Hidup	BLHD
14	Meningkatkan pengelolaan pencemaran air, udara dan tanah terkait Rencana Aksi Daerah untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GTR)		Rasio tindak lanjut terhadap jumlah pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup (%)	20	100	Lingkungan Hidup	BLHD
15	Mengembangkan pola kemitraan jasa lingkungan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam pengelolaan konservasi sumberdaya alam, hutan pesisir laut dan pulau-pulau kecil	Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	Luas area rehabilitasi hutan dan lahan (ha)	8.000	40.000	Lingkungan Hidup	Hutbun

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
16	Meningkatkan pengamanan dan pencegahan kerusakan kawasan hutan		Persentase peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung (%)	20	100	Lingkungan Hidup	BLHD
17	Meningkatkan pengelolaan pasokan, cakupan dan kualitas pelayanan listrik dan energi mendukung kawasan strategis ekonomi dan usaha masyarakat pedesaan	Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi	Tingkat penambahan jumlah Instalasi dan Sambungan Rumah Terpasang (SS)	25.000	125000	Energi dan Sumber Daya Mineral	Distamben
			Tingkat penambahan jumlah Unit Terpasang Pembangkit dan Reaktor dari Energi Terbarukan (Unit)	106	1353	Energi dan Sumber Daya Mineral	Distamben
			Persentase tingkat pemenuhan Kebutuhan Jaringan Listrik di KP3B (%)	80%	100	Energi dan Sumber Daya Mineral	Distamben
18	Meningkatkan pengusahaan pertambangan dan energy alternatif/energy terbaharukan dan gerakan hemat energi bagi masyarakat dan pelaku usaha	Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi,	Cakupan ketersediaan Laporan Pemetaan, Penelitian, Pengembangan dan Sumber Data Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi (Dokumen)	10	58	Energi dan Sumber Daya Mineral	Distamben

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
			Cakupan ketersediaan sarana pengendalian dan konservasi air tanah (unit)	4	20	Energi dan Sumber Daya Mineral	Distamben
19	Membina dan mengembangkan bidang ketenagalistikan dan energi	Program Pengembangan, perusahaan Potensi dan Produk Pertambangan dan Energi	Cakupan layanan Penerbitan Dokumen Perijinan yang menjadi Kewenangan Provinsi (ijin)	10	50	Energi dan Sumber Daya Mineral	Distamben
			Cakupan layanan Kesepakatan Kerjasama Bidang Pertambangan dan Energi (Dokumen)	4	5	Energi dan Sumber Daya Mineral	Distamben
			Cakuman layanan informasi data bidang pertambangan dan energi yang siap dipublikasikan (unit)	4	20	Energi dan Sumber Daya Mineral	Distamben
Misi Ke-2 :							
Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat							
1	Menguatkan kelembagaan dan usaha, kapasitas SDM, sistem pembiayaan, dan peluang pasar K-UMKM yang sejalan dengan perkembangan dunia usaha	Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM	Persentase Koperasi dan UMKM yang terakses sumber-sumber permodalan (%)	0%	18,28%	Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Dinas K-UMKM
			Tingkat pertumbuhan usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan (%)	0%	18,28%	Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Dinas K-UMKM
		Program Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM	Tingkat layanan teknologi, inovasi, daya saing, dan mutu produk koperasi dan UMKM (%)	0%	29,00%	Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Dinas K-UMKM

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
			Tingkat layanan akses akses pasar dan pemasaran bagi produk koperasi dan UMKM (%)	0%	29,00%	Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Dinas K-UMKM
		Program Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM	Pesentase peningkatan kapasitas kelembagaan dan produktivitas Koperasi dan UMKM (%)	0%	20,66%	Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Dinas K-UMKM
			Persentase peningkatan kompetensi pelaku usaha KUMKM (%)	0%	20,66%	Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Dinas K-UMKM
2	Perluasan kesempatan kerja	Program peningkatan produktifitas tenaga kerja, Perluasan kesempatan kerja dan Berusaha	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka 0,5% setiap Tahunnnnya	12,56%	10,60%	Ketenagakerjaan	Disnakertrans
3	Meningkatkan produksi, produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan	Peningkatan Produksi Padi (GKG) (ton)	2.017.956	2.396.699	Pertanian	Distanak
			Surplus Beras (ton)	15.693	88.270	Pertanian	Distanak

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
			Penyediaan Benih Sumber Padi (ha)	24.000	34.000	Pertanian	Distanak
			Penyediaan Cadangan Benih Daerah (CBD) Padi (ha)	50.000	100.000	Pertanian	Distanak
			Produksi Hortikultura (Durian, Manggis, Melon, Cabe Besar) (ton)	31.421	33.967	Pertanian	Distanak
			Produksi Daging (sapi dan kerbau) (ton)	27.124.558	37.069.669	Pertanian	Distanak
			Cakupan peningkatan upaya-upaya rehabilitasi, diversifikasi, intensifikasi dan peremajaan tanaman perkebunan (ha)	500	500	Pertanian	Hutbun
			Cakupan ketersediaan sumber benih tanaman perkebunan (unit)	4	3	Pertanian	Hutbun
			Jumlah unit usaha perkebunan terpadu (agrowisata) (unit)	1	1	Pertanian	Hutbun
			cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pembangunan perkebunan (unit)	3	3	Pertanian	Hutbun
			Cakupan ketersediaan benih tanaman perkebunan yang berkualitas (batang)	65.000	107.000	Pertanian	Hutbun
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	66.427	70.050	Pertanian	DKP
			Nilai Tukar Nelayan (NTN)	115	> 100	Pertanian	DKP
			Jumlah Produksi Benih Ikan (Milyar Ekor)	1	1,70	Pertanian	DKP
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	143607	190.000	Pertanian	DKP

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
		Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan	Cakupan Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pertanian (unit)	5	5	Pertanian	Distanak
			Cakupan Peningkatan Akses Kelompok tani terhadap Perbankan (unit)	20	30	Pertanian	Distanak
			Cakupan tingkat pemanfaatan teknologi terapan bidang kehutanan dan perkebunan (unit)	2	2	Pertanian	Hutbun
			Peningkatan jumlah kelompok usaha mandiri (unit)	20	20	Pertanian	BKPP
		Program Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan	Nilai Tukar Petani (NTP)	104	106	Pertanian	Distanak
			Cakupan Penerapan Good Agricultural Practice (GAP) / Standar Operational Procedure (SOP) Hortikultura (unit)	2	3	Pertanian	Distanak
			Cakupan kemitraan Kelompok Tani dan Dunia Usaha (unit)	5	11	Pertanian	Distanak
			Tingkat perkembangan jumlah aneka usaha kehutanan dan perkebunan (unit)	6	6	Pertanian	Hutbun
			Cakupan tingkat kemantapan tata usaha dan pembinaan industri kehutanan dan perkebunan (unit)	150	250	Pertanian	Hutbun

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
			Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	0,70%	0,85%	Pertanian	DKP
			Jumlah Ekspor Perikanan (Ton)	1000	5000	Pertanian	DKP
			Tingkat Kosumsi Ikan (Kg/Kapita)	25	30	Pertanian	DKP
		Program Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Pertanian	Cakupan ketersediaan Taktor (unit)	14	40	Pertanian	Distanak
			Cakupan ketersediaan Rice Milling Unit (RMU) (unit)	2	5	Pertanian	Distanak
			Cakupan Pengembangan Jaringan Irigasi (Ha)	8200	4.000	Pertanian	Distanak
4	Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata untuk peningkatan daya beli masyarakat	Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata	Meningkatnya pengembangan daya tarik wisata	20%	100%	Pariwisata	Disbudpar
			Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi wisata	15%	100%	Pariwisata	Disbudpar
			Meningkatnya pengembangan produk dan usaha pariwisata	15%	100%	Pariwisata	Disbudpar
			Meningkatnya promosi wisata dan budaya dalam negeri dan luar negeri	20%	100%	Pariwisata	Disbudpar
		Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisata	Tingkat penguatan kemitraan pariwisata, usaha ekonomi kreatif dan lembaga/instansi pemerintah (%)	20%	100%	Pariwisata	Disbudpar

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
			Rasio peningkatan kapasitas kelembagaan kebudayaan dan pariwisata (%)	17%	100%	Pariwisata	Disbudpar
			Rasio peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata, kebudayaan dan instansi lainnya (%)	15%	100%	Pariwisata	Disbudpar
5	Meningkatkan daya saing industri	Program Peningkatan Daya Saing Industri	Cakupan Penataan Kawasan dan Penguatan Struktur industri (%)	20%	100%	Industri	Disperindag
			Cakupan Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru Bidang Industri (%)	20%	100%	Industri	Disperindag
			Cakupan Peningkatan Mutu/Daya Saing, Stadarisasi dan Sertifikasi Produk (%)	20%	100%	Industri	Disperindag
			Cakupan Kemitraan Usaha dan Pengembangan klaster industri (%)	20%	100%	Industri	Disperindag
6	Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan	Cakupan Peningkatan Prasarana dan Sarana Kelancaran Distribusi Perdagangan/Pasar tradisional (%)	15%	100%	Perdagangan	Disperindag
			Cakupan Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen, dan Pengawasan Barang Beredar/Jasa (%)	15%	100%	Perdagangan	Disperindag

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
7	Meningkatkan pengusahaan dan nilai tambah produksi sumber daya mineral	Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi	Cakupan ketersediaan Laporan Pemetaan, Penelitian, Pengembangan dan Sumber Data Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi (Dokumen)	10	58	Energi dan Sumber Daya Mineral	Distamben
			Cakupan ketersediaan sarana pengendalian dan konservasi air tanah (unit)	4	20	Energi dan Sumber Daya Mineral	Distamben
8	Mengembangkan kawasan minapolitan sebagai upaya percepatan pembangunan kelautan dan perikanan di sentra-sentra produksi perikanan	Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Luas Areal Konservasi Laut (Ha)	1	1	Kelautan dan Perikanan	DKP
			Jumlah Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Diselesaikan (Kasus)	12	12	Kelautan dan Perikanan	DKP
9	Peningkatan ketersediaan, akses, kualitas, keragaman dan keamanan panga	Program Ketahanan Pangan Masyarakat	Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Ton)	200	200	Ketahanan Pangan	BKPP
			Jumlah Cadangan Pangan Masyarakat (ton)	426,9837	807	Ketahanan Pangan	BKPP

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
			Jumlah lembaga cadangan pangan pemerintah provinsi (lembaga)	0	1	Ketahanan Pangan	BKPP
			Jumlah lembaga cadangan pangan masyarakat (Lembaga)	42	82	Ketahanan Pangan	BKPP
			Cakupan layanan fasilitasi program bantuan Raskin (%)	-	100	Ketahanan Pangan	BKPP
			Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat (Skors PPH)	84	96	Ketahanan Pangan	BKPP
			Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani (Kecamatan)	10	52	Ketahanan Pangan	BKPP
10	Mengembangkan aneka usaha non kayu serta usaha ekonomi produktif sekitar hutan.	Program Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Hutan dan Lahan	Cakupan pengendalian penggunaan kawasan hutan (unit)	6	6	Kehutanan	Dishutbun
			Peningkatan jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan (kelompok)	5	10	Kehutanan	Dishutbun
11	Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka mempertahankan keberadaan investasi yang ada serta menarik investasi baru	Program Peningkatan Iklim Investasi	Cakupan layanan regulasi perijinan bidang Penanaman Modal (%)	25%	100%	Penanaman Modal	BKPMPT
12	Membentuk forum investasi serta meningkatkan promosi dan kerjasama investasi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Nilai Realisasi Investasi PMA (Rp)	8,1 Trilyun	10.85 Trilyun	Penanaman Modal	BKPMPT
			Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp)	3,5 Trilyun	4.69 Trilyun	Penanaman Modal	BKPMPT

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
Misi Ke-3 : Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Religius, Cerdas dan Berdaya Saing dalam Kerangka Penguatan NKRI							
1	Meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan PAUD	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Paud	32	60	Pendidikan	Dindik
2	Menuntaskan Banten Bebas Buta Aksara	Program Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun	APM Jenjang SD/SDLB/MI/Paket A	98,76	99,95	Pendidikan	Dindik
3	Mewujudkan Banten Bebas Biaya Pendidikan Dasar dalam rangka Penuntasan Wajar Dikdas Sembilan Tahun		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B/Wustho	98,88	100	Pendidikan	Dindik
4	Meningkatkan Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah	Program Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMA-LB/MA/Paket C	59,87	65,92	Pendidikan	Dindik
5	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah	Program Peningkatan Mutu, Kesejahteraan dan Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio jumlah guru yang memenuhi kualifikasi minimum S.1 / D.IV terhadap jumlah guru keseluruhan	53173	60,323	Pendidikan	Dindik
6	Fasilitasi peningkatan pemerataan dan mutu Pendidikan Tinggi	Program Pendidikan Tinggi	Angka Partisipasi Kasar (APK) PT/PTA	6,64	7,31	Pendidikan	Dindik
			Jumlah Prodi yang terakreditasi	1	25	Pendidikan	Dindik

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
7	Meningkatkan Pemerataan dan Mutu Pendidikan Non Formal dan Informal)	Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFi)	Angka Buta Aksara Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (orang)	218750	67500	Pendidikan	Dindik
8	Meningkatkan Pemerataan dan Mutu Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PK dan PKL)						
9	Meningkatkan Kompetensi dan Kesejahteraan Guru serta Tenaga Kependidikan	Program Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan Pendidikan	Rata -rata Lama Sekolah (tahun)	8,99	9,65	Pendidikan	Dindik
10	Pengembangan infrastruktur pendidikan berbasis Website dan TIK		Ketersediaan Sarana Prasarana SMAN CMBBS (%)	45%	100%	Pendidikan	Dindik
11	Meningkatkan kemampuan dan budaya baca masyarakat khususnya pada usia sekolah	Program Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Tingkat kunjungan perpustakaan per hari (%)	200 (40%)	500 (100%)	Perpustakaan	Baperpus-arda
			Meningkatnya kunjungan ke website BPAD (%)	10	125 (100%)	Perpustakaan	Baperpus-arda

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
12	Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi	Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	Peningkatan Jumlah Perpustakaan sesuai standar (%)	1 (2%)	42 (100%)	Perpustakaan	Baperpus-arda
13	Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama masyarakat miskin dan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak)	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) (%)	66	86	Kesehatan	Dinkes
			Persentase Ibu bersalin yg ditolong oleh Nakes terlatih (Cakupan PN) (%)	88,7	92	Kesehatan	Dinkes
			Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1)	90%	92%	Kesehatan	Dinkes
14	Menyusun kebijakan standar pelayanan kesehatan Provinsi, pedoman dan regulasi kesehatan	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) (%)	60	77	Kesehatan	Dinkes

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
			Persentase RSUD dan Swasta yang melayani pasien penduduk miskin (%)	30	100	Kesehatan	Dinkes
			Persentase RS yg melaksanakan PONEK (%)	80	100	Kesehatan	Dinkes
			Persentase Sarana Dan Prasana Rs Provinsi & Labkesda Provinsi Banten (%)	60	100	Kesehatan	Dinkes
15	Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi bawah 1 tahun / UCI (%)	85	97,5	Kesehatan	Dinkes
			Prevalensi HIV pada penduduk usia 15-24 tahun (%)	<0,5	<0,5	Kesehatan	Dinkes
			Persentase kasus baru Tuberkulosis Paru (BTA positif) yang disembuhkan (%)	90	92	Kesehatan	Dinkes
			Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk	≤1	≤1	Kesehatan	Dinkes
			Presentasi puskesmas yang melaksanakan program pengendalian Penyakit Tidak Menular (%)	10	60	Kesehatan	Dinkes
			Persentase cakupan penduduk yang terakses air minum berkualitas (%)	74	79	Kesehatan	Dinkes

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
16	Mengembangkan sistem kesehatan	Program Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional Pelayanan Perawatan pada Masyarakat di RS Rujukan Prov Banten (%)	90	100	Kesehatan	Dinkes
			Prosentase promkesja dan surveilen kesehatan kerja (%)	65	95	Kesehatan	Dinkes
			Prosentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat pekerja (%)	100	100	Kesehatan	Dinkes
			Ketersediaan Obat, Bahan dan Alat Penunjang RSUD Malingping (%)	100%	100%	Kesehatan	Dinkes
			Jumlah Pasien Mendapat Layanan Kesehatan Gratis (orang)	200	1000	Kesehatan	Dinkes
17	Meningkatkan kecukupan obat dan peralatan kesehatan	Program Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat buffer di Provinsi Banten (%)	100	100	Kesehatan	Dinkes
			Persentase Sarana Kesehatan, Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang berkualitas (%)	35	80	Kesehatan	Dinkes
18	Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan	Prosentase Institusi Pendidikan Kesehatan binaan yang terakreditasi (unit)	66	86	Kesehatan	Dinkes
			Cakupan Puskesmas yg melaksanakan SIKDA (%)	10	40	Kesehatan	Dinkes

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
			Presentase jumlah kab/kota yang minimal mempunyai 4 puskesmas yang telah melaksanakan upaya kesehatan kerja (%)	65	100	Kesehatan	Dinkes
			Prosentase Sarana dan prasarana Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Banten (%)	75	100	Kesehatan	Dinkes
			Persentase Pembinaan RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas (%)	60	100	Kesehatan	Dinkes
			Jumlah Tenaga Kesehatan RS Malingping yang ditingkatkan kemampuannya (orang)	34	29	Kesehatan	RSUD Malingping
19	Meningkatkan jumlah dan mengembangkan sarana dan prasarana Puskesmas termasuk Puskesmas PONED	Program Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional Pelayanan Perawatan pada Masyarakat di RS Rujukan Prov Banten (%)	80	100	Kesehatan	Dinkes
			Prosentase promkesja dan surveilen kesehatan kerja (%)	70	95	Kesehatan	Dinkes
			Prosentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat pekerja (%)	100	100	Kesehatan	Dinkes
			Ketersediaan Obat, Bahan dan Alat Penunjang RSUD Malingping (%)	100%	100%	Kesehatan	RSUD Malingping
			Jumlah Pasien Mendapat Layanan Kesehatan Gratis (orang)	200	1000	Kesehatan	RSUD Malingping
20	Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan yang berbasis kemandirian berusaha	Program Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengembangan Kota Layak Anak Kab/Kota (Forum Kader, POKJANAL)	1 Kab/Kota	8 kab/Kota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPMD

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
21	Meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak		Rasio Pembinaan dan Pengembangan Jaringan kerja lembaga masyarakat (TP. PKK Prov, Kab/Kota, Kec, HARGANAS)	100%	100%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPMD
			Rasio Peningkatan Kapasitas Pengelola P2TP2A dan lembaga lainnya	100%	100%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPMD
			Rasio Pembinaan TKP3	100%		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPMD
			Rasio Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG TKP3, PSW (AP,PPRG)	100%	100%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPMD
			Rasio Pembinaan Organisasi Wanita (BKOW dan lainnya)	100%	100%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPMD
			Rasio Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan(P2WKSS,GSI,APE)	100%	100%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPMD
			Prosentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan (Dalam dan Luar Provinsi)	90%	100%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPMD

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
22	Mewujudkan pemuda Banten yang memiliki semangat dan idealisme kebangsaan, kewirausahaan, kepemimpinan, kepeloporan dan kejuangan	Program Kepemudaan dan Kepramukaan	Jumlah organisasi pramuka yang mendapatkan pelayanan Kepramukaan (unit)	0	45 kwartir	Kepemudaan dan Olahraga	Dispora
			Jumlah Kelompok/ Organisasi Kepemudaan yang berperan dalam kewirausahaan (kel)	10 klp	62 klp	Kepemudaan dan Olahraga	Dispora
23	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sehat jasmani dan rohani melalui olahraga	Program Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga	Rasio Cabang Olahraga Berprestasi terhadap jumlah kejuaraan tingkat nasional/regional (%)	17 cabor / 15 event	94 cabor/ 88 event	Kepemudaan dan Olahraga	Dispora
			Tingkat pemenuhan prasarana dan sarana olahraga	0	5 unit	Kepemudaan dan Olahraga	Dispora
24	Meningkatkan daya saing tenaga kerja	Program Keterampilan Tenaga Kerja	Meningkatnya Keterampilan dan Kesempatan Tenaga Kerja	12,56%	10,60%	Ketenagakerjaan	Disnakertrasn
25	Meningkatkan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan	Program Pengembangan Kelembagaan, Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	Meningkatnya Hubungan Industrial, Kesejahteraan Pekerja dan Perlindungan Tenaga Kerja	280 orang	2.640 org	Ketenagakerjaan	Disnakertrasn

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
Misi Ke-4 : Penguatan Semangat Kebersamaan Antar-Pelaku Pembangunan dan Sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Selaras, Serasi dan Seimbang							
1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas rehabilitasi, jaminan, perlindungan dan pemberdayaan sosial	Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin	Jumlah masyarakat miskin yang memperoleh pemberdayaan sosial	1.540 KK	8.010 KK	Sosial	Dinsos
			Jumlah komunitas masyarakat terpencil yang diberdayakan	120 KK	1.325 KK	Sosial	Dinsos
			Rasio pembinaan kelembagaan penanggulangan kemiskinan melalui TKPKD (Pengelola PNPM Perdesaan Perkotaan dan jenis PNPM lainnya)	30%	50%	Sosial	Dinsos
		Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah Lanjut Usia yang dilayani dan dilindungi	851 Org	5428 Org	Sosial	Dinsos
			Jumlah Anak yang dilayani, dilindungi dan direhabilitasi	1096 Org	6.819 Org	Sosial	Dinsos
			Jumlah Penyandang Cacat yang direhabilitasi	530 Org	3180 Org	Sosial	Dinsos
			Jumlah lembaga sosial anak yang dibina	16 Lbg	108 Lbg	Sosial	Dinsos
			Jumlah tuna sosial yang direhabilitasi	650 Org	4020 Org	Sosial	Dinsos
			Jumlah PMKS yang memperoleh pelayanan, perlindungan dan bimbingan lanjut Balai Perlindungan Sosial (BPS)	277 Org	1.812 Org	Sosial	Dinsos

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
			Jumlah PMKS yang memperoleh bimbingan sosial dan keterampilan dan bimbingan lanjut pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial (BP2S)	282 Org	2.562 Org	Sosial	Dinsos
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Korban Tindak Kekerasan/Pekerja Migran yang dilindungi	40 Org	290 Org	Sosial	Dinsos
			Jumlah bantuan untuk korban bencana	3.800 Org	29050 Org	Sosial	Dinsos
			Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang dilatih	1.286 Org	7.716 Org	Sosial	Dinsos
			Jumlah Masyarakat yang mendapat jaminan Sosial	286 Org	2116 Org	Sosial	Dinsos
2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan lembaga sosial, keagamaan, Perayaan Hari Besar Keagamaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama	Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	559 Org	3579 Org	Sosial	Dinsos
			Jumlah Kelembagaan sosial yang dibina	280 Lbg	3030 Lbg	Sosial	Dinsos
			Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan (NK3)	350 Org	2350 Org	Sosial	Dinsos

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
			Jumlah Penyuluhan Sosial yang dilaksanakan	154 Org	1.108 Org	Sosial	Dinsos
			Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan	12 keg	12 keg.	Sosial	Biro Kesra
			Meningkatnya kualitas kelembagaan kelompok/badan/lembaga/organisasi keagamaan	600 lembaga	600 lembaga	Sosial	Biro Kesra
3	Meningkatkan upaya revitalisasi nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal yang relevan bagi peningkatan kemajuan Banten	program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan	100%	100%	Kebudayaan	Disbudpar
			Meningkatnya pelestarian tradisi masyarakat adat	100%	100%	Kebudayaan	Disbudpar
			Meningkatnya pelestarian nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal	100%	100%	Kebudayaan	Disbudpar
			Meningkatnya pelestarian dan perlindungan cagar budaya, museum dan kesejarahan	100%	100%	Kebudayaan	Disbudpar
4	Menata database penduduk dan penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan (%)	100%	100%	Kependudukan dan Catatan Sipil	Biro Pemerintahan
5	Revitalisasi Program Keluarga Berencana.	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	Cakupan Peningkatan integrasi pengelolaan layanan Keluarga Berencana (orang)	80 Orang	480 Orang	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BPPMD

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
6	Menata persebaran penduduk, baik di dalam maupun keluar wilayah provinsi	Program Penyiapan, pengerahan dan Pembinaan Transmigrasi	Cakupan Penyiapan, Pelayanan, Pembinaan, dan Kebutuhan Masyarakat Transmigran Serta Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat (KK)	350 KK	350 KK	Ketransmigrasian	Disnakertrans
			Cakupan Fasilitas Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi (KK)	155 KK	200 KK	Ketransmigrasian	Disnakertrans
7	Mewujudkan kerjasama pembangunan antar daerah yang saling menguntungkan	Program Kerjasama Pembangunan	Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah (Dok)	3	15	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri	100%	100%	Perencanaan Pembangunan	Biro Pemerintahan
Misi Ke-5 : Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Efisien							
1	Meningkatkan kualitas perencanaan dan mengembangkan perencanaan yang pro publik	Program Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan (%)	100%	100%	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
2	Meningkatkan pengendalian pembangunan dan mengembangkan sistem pengawasan	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Cakupan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan	100%	100%	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			Rasio pelaporan pengendalian pelaksanaan APBD	100%	100%	Perencanaan Pembangunan	Biro Ekbang

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
3	Mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika	Meningkatnya penyelenggaraan dan pelayanan aksesibilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika sebesar 100% tahun 2017.	6,2%	100%	Komunikasi dan Informatika	Dishubkominfo
4	Pemanfaatan IPTEK untuk peningkatan daya saing daerah		Cakupan Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan Lembaga Penyiaran (%)	20%	75%	Komunikasi dan Informatika	Dishubkominfo
			Cakupan Pemantauan Isi Siaran Radio dan Televisi (%)	20%	75%	Komunikasi dan Informatika	Dishubkominfo
			Cakupan Penyelenggaraan Perizinan Penyiaran (%)	100%	100%	Komunikasi dan Informatika	Dishubkominfo
5	Melaksanakan reformasi birokrasi melalui penataan struktur yang proporsional, mengembangkan profesionalisme, inovasi, IPTEK dan pengadaan secara elektronik	Program Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum,	Rasio Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum	100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Biro Pemerintahan

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
			Rasio Fasilitasi Administrasi Pertanahan	100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Biro Pemerintahan
			Jumlah Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa	2 Dok	10 Dok	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Biro Ekbang
			Rasio Kegiatan Fasilitasi LPSE Provinsi Banten	100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Biro Ekbang

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
			Koordinasi Pengendalian Inflasi daerah	5%	3%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Biro Ekbang
			Pengembangan dan Peningkatan Lembaga Keuangan daerah	10 Unit	45 unit	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Biro Ekbang
			Penyusunan Bahan Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daerah	10 Dok	50 dok	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Biro Ekbang

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
			Pengembangan Pelayanan Publikasi, Kerjasama Jaringan Media dan Informasi	100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Biro Humas
			Peningkatan Pengelolaan Informasi Komunikasi dan Dokumentasi	100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Biro Humas
			Pengelolaan Sistem layanan Informasi Promosi	100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Kantor Penghubung

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
			Meningkatnya kualitas dan kuantitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	8 dok	16 dok	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Biro Kesra
		Program Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis, Inovasi Daerah dan IPTEK	Ketersediaan dokumen kebijakan hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah (dok)	8	170 Dokumen	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Balitbangda
		Program Penataan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Rasio ketersediaan dokumen penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, Lembaga lain bagian perangkat daerah, Ketatalaksanaan, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Perangkat Daerah.	100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Biro Organisasi

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
6	Meningkatkan dan mengembangkan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan publik untuk mewujudkan clean government and good governance	Program Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	Rasio Peningkatan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur.	100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Inspektorat
		Program Pembinaan Karier dan Administasi Kepegawaian Aparatur	Rasio Pembinaan dan Kesejahteraan PNS Provinsi Banten	100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	BKD
			Rasio Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	BKD

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
			Rasio Pengembangan Sumber Daya Aparatur	100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	BKD
		Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Rasio Penyelenggaraan Diklat dan Bimtek Aparatur	100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Badiklat
			Rasio Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimtek Aparatur	100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Badiklat

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
		Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Seluruh SKPD
			Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan	100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Seluruh SKPD
		Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan	100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Seluruh SKPD

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
			Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah	100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Seluruh SKPD
			Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur	100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Seluruh SKPD
			Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian	100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Seluruh SKPD

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
			Jumlah Kekayaan Daerah (Rp)	4.891 T	7.256 T	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Biro Perlengkapan dan Aset
			Rasio Fasilitasi Pengelolaan Perlengkapan dan Aset Daerah	100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Biro Perlengkapan dan Aset
7	Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel	Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah	Ketersediaan Sistem/Data/Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (unit)	3	3	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	DPPKD

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
			Persentase ketepatan waktu pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (%)	100	100	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	DPPKD
			Cakupan fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi (%)	100	100	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	DPPKD
		Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	2.981 T	4.431 T	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	DPPKD

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
			Ketersediaan jumlah sistem/data/dokumen/informasi penunjang peningkatan pendapatan daerah (unit)	2	2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	DPPKD
8	Menata sistem hukum di daerah	Program Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM	Rasio ketersediaan Dokumen Produk Hukum (%)	100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Biro Hukum
			Cakupan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum & HAM (%)	100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Biro Hukum

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
9	Meningkatkan pembinaan tramtibmas, satuan perlindungan masyarakat, dan unsur rakyat terlatih lainnya	Program Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Rasio Pengamanan, Pengawasan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris daerah	100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Pol PP
			Rasio Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Pol PP
			Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Pol PP

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
			Rasio Pendataan dan Tindaklanjut Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Pol PP
10	Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Rasio Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana	100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	BPBD
			Rasio Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Pos Bencana dan Tanggap Darurat Bencana.	100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	BPBD

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
			Rasio Bantuan dan Rehabilitasi Pemulihan Kondisi Pasca Bencana	100%	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	BPBD
11	Meningkatnya kapasitas lembaga legislatif	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang Terakomodir dalam Rencana Pembangunan Daerah	1	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Set. DPRD
			Jumlah Kegiatan Pembahasan dan Penetapan RAPERDA Serta Keputusan DPRD	1	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Set. DPRD

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
			Jumlah Dukungan Layanan Komunikasi, Informasi, Publikasi Alat Kelengkapan DPRD dan Sosialisasi Produk Hukum DPRD	1	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Set. DPRD
			Jumlah Kegiatan Pembahasan Rapat-rapat DPRD	1	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Set. DPRD
			Jumlah Kegiatan Pengawasan Oleh DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	1	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Set. DPRD

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
			Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas, Profesionalisme dan Ketersediaan Tenaga Ahli pendukung AKD	1	100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Set. DPRD
12	Meningkatkan kualitas data dan informasi pendukung perencanaan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan	Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah	Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan (unit)	41 Paket	205 Paket	Statistik	Seluruh SKPD
13	Meningkatkan kinerja pengelolaan kearsipan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan	Program Pembinaan Kearsipan Daerah	Persentase SKPD Provinsi yang pengelolaan arsipnya sesuai dengan ketentuan (%)	17 (40%)	41 (100%)	Kearsipan	Baperpus-arda
			Persentase cakupan koneksi Jaringan Informasi Kearsipan Provinsi (JIKP) dengan seluruh SKPD, Kab/Kota (%)	17 (40%)	41	Kearsipan	Baperpus-arda

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
14	Meningkatkan partisipasi dan peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan	Rasio Desa/Kel Yang Mengalami peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan	47,72%	100%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPPMD
			Rasio Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa/kel	10,06%	13%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPPMD
			Rasio Pengembangan Inovasi dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna	1 Posyantek	10 Posyantek	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPPMD
			Rasio Penguatan Kemandirian Masyarakat Desa (Lembaga Keuangan Mikro Desa (BUMDes)	79,34%	100%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPPMD
			Rasio Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga Pedesaan setiap desa terhadap jumlah desa keseluruhan (Pasar Desa, UED-SPP, UPPKS, Lumbung Desa)	2,42%	30. 02 %	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPPMD
			Rasio pembinaan dan pengembangan Ekonomi masyarakat (BKM, peralihan pengelolaan PNPM)	3,62%	40.52 %	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPPMD
			Rasio Pembinaan Pemerintah Desa/Kel (pemerintah desa dan BPD)	6 desa/kel	6 desa/kel	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPPMD
			Rasio pengembangan Pemerintahan Desa	1261 desa	1261 desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPPMD

NO	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
15	Memfasilitasi peningkatan peran dan fungsi partai politik	Program Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan pembinaan lembaga yang sadar politik (%)	1643	1643	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
16	Melibatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik		Cakupan pembinaan lembaga yang sadar kerukunan (%)	2104	2104	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
			Cakupan kegiatan Pemeliharaan Stabilitas Daerah (%)	6 Keg	100%	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol